

ABSTRAK

Endang Mulyani, 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) daerah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Lubuk Begalung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara naturalistik. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan penelitian diambil secara *snowball* (teknik bola salju) diantaranya adalah Camat, Sekretaris camat Lubuk Begalung, Kasi Pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketua LPM, sejumlah Lurah, tokoh masyarakat, Tokoh kepemudaan, ketua RT, ketua RW dan PKK. Sedangkan untuk analisis data mengikuti analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang diambil dengan metode analisis data interaktif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan daerah di Kecamatan Lubuk Begalung masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal 1) fokus perencanaan belum dalam bentuk analisa masalah dan kebutuhan, 2) masyarakat belum memiliki peluang yang sama dalam mengikuti musrenbang 3) Sinergisitas perencanaan antar wilayah dilaksanakan dalam bentuk program prioritas secara bergiliran belum dalam bentuk prioritas program penting dan mendesak dan 4) legalitas petunjuk teknis dalam bentuk perda belum dimiliki. Upaya pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung dalam meningkatkan partisipasi belum menunjukkan hasil maksimal. Untuk itu diperlukan kegiatan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam mengikuti musrenbang, perencanaan antar wilayah yang sinergis dan peraturan daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang kecamatan. Diperlukannya upaya pemerintah yang lebih maksimal dalam bentuk program-program peningkatan partisipasi.